

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Stakeholder

Stakeholder adalah setiap kelompok yang berada di dalam maupun di luar perusahaan yang mempunyai peran dalam menentukan keberhasilan perusahaan (Kasali dalam Wibisono, 2007). Menurut Ghazali dan Chariri (2007) *stakeholder theory* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingan perusahaan, namun juga harus memberikan manfaat bagi *stakeholder* (pemegang saham, kreditor, konsumen, pemasok, analis, karyawan, pemerintah, dan pihak lain seperti masyarakat yang merupakan bagian dari lingkungan sosial).

Kasali (Wibisono, 2007) membagi *stakeholders* menjadi sebagai berikut:

1. *Stakeholders* Internal dan *Stakeholders* Eksternal.

Stakeholders internal adalah *stakeholders* yang berada di dalam lingkungan organisasi. Misalnya karyawan, manajer dan pemegang saham (*shareholder*). Sedangkan *stakeholders* eksternal adalah *stakeholders* yang berada di luar lingkungan organisasi, seperti penyalur atau pemasok, konsumen atau pelanggan, masyarakat, pemerintah, pers, kelompok *social responsible investor*, *licensing partner* dan lain-lain.

2. *Stakeholders* Primer, *Stakeholders* Sekunder, dan *Stakeholders* Marjinal.

Stakeholders primer adalah *stakeholders* yang paling penting, *stakeholders* sekunder adalah *stakeholder* yang kurang penting.

Sedangkan *stakeholders* yang bisa diabaikan disebut *stakeholders* marjinal. Urutan prioritas ini tiap perusahaan bisa berbeda, urutannya tidak bersifat kaku, bisa berubah dari waktu ke waktu.

3. *Stakeholders* Tradisional dan *Stakeholders* Masa Depan.

Karyawan dan konsumen dapat disebut *stakeholders* tradisional, karena saat ini sudah berhubungan dengan organisasi. Sedangkan *stakeholders* masa depan adalah *stakeholders* pada masa yang akan datang diperkirakan akan memberi pengaruh pada organisasi, seperti mahasiswa, peneliti, dan konsumen potensial.

4. *Proponents*, *Opponents*, dan *Uncommitted*

Proponents adalah kelompok yang memihak organisasi, *opponents* adalah pihak yang menentang organisasi, dan *uncommitted* adalah pihak yang tak peduli dengan organisasi. Organisasi perlu mengetahui perbedaannya, agar dapat melihat permasalahan dan bisa merencanakan strategi yang sesuai.

5. *Silent Majority* dan *Vocal Majority*

Stakeholders dalam melakukan komplain atau mendukung perusahaan, ada yang menyampaikannya secara aktif (*vocal majority*) dan ada juga yang secara pasif (*silent majority*).

2.2 Teori Legitimasi

Teori legitimasi berfokus pada interaksi antara perusahaan dengan masyarakat, hal tersebut didasarkan pada pandangan bahwa perusahaan berusaha untuk menciptakan keselarasan antara nilai-nilai sosial yang melekat dalam kegiatannya dengan norma-norma perilaku yang ada dalam sistem sosial masyarakat dimana perusahaan adalah bagian dari sistem tersebut. Selama kedua sistem nilai tersebut selaras, hal tersebut dapat dipandang sebagai legitimasi perusahaan. Namun, ketika terjadi ketidakselarasan aktual di antara kedua sistem nilai tersebut, maka akan terdapat ancaman terhadap legitimasi perusahaan (Dowling dan Pfeffer, 1975 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Perbedaan antara nilai-nilai perusahaan dengan nilai-nilai sosial masyarakat dinamakan *legitimacy gap*.

Dalam teori legitimasi, suatu perusahaan beroperasi dengan izin dari masyarakat. Izin ini dapat ditarik apabila masyarakat menilai bahwa perusahaan tidak melakukan hal-hal yang diwajibkan kepada perusahaan tersebut. Legitimasi sangat penting bagi perusahaan karena keberadaan perusahaan di lingkungan sosial atau komunitas sosial yang harus berinteraksi dengan masyarakat di lingkungan perusahaan. Hal ini juga berkaitan dengan kelangsungan perusahaan itu sendiri (Sari dan Marsono, 2013). Oleh karena itu perusahaan perlu melakukan pengungkapan *sustainability report* yang diharapkan akan memberikan dampak yang positif bagi masyarakat sehingga masyarakat sekitar dapat menerima keberadaan perusahaan.

2.3 Kinerja Keuangan

Menurut Rudianto (2013) kinerja keuangan adalah hasil atau prestasi yang telah dicapai oleh manajemen perusahaan dalam mengelola aset perusahaan secara efektif dalam periode tertentu. Kinerja keuangan dibutuhkan oleh perusahaan untuk mengetahui dan mengevaluasi tingkat keberhasilan perusahaan dalam melakukan aktivitas keuangan yang telah dilaksanakan.

Untuk mengukur kinerja keuangan perusahaan dapat menggunakan analisis laporan keuangan. Analisis laporan keuangan dilakukan dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang meliputi: rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas (Kasmir, 2016).

1. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban (utang) jangka pendek (Kasmir, 2016). Jenis-jenis rasio likuiditas yang dapat digunakan perusahaan untuk mengukur kemampuan, yaitu:

a. Rasio Lancar (*Current Ratio*)

Rasio lancar merupakan rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendek atau utang yang segera jatuh tempo pada saat ditagih secara keseluruhan.

Current ratio diukur dengan rumus:

$$\text{Current Ratio} = \frac{\text{Aktiva lancar (Current Assets)}}{\text{Kewajiban lancar (Current Liabilities)}}$$

b. Rasio Cepat (*Quick Ratio*)

Rasio cepat merupakan rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi atau membayar kewajiban atau utang lancar (utang jangka pendek) dengan aset lancar tanpa memperhitungkan nilai persediaan (*inventory*). *Quick ratio* diukur dengan rumus:

$$\text{Quick Ratio} = \frac{\text{Current Assets} - \text{Inventory}}{\text{Current Liabilities}}$$

c. Rasio Kas (*Cash Ratio*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur seberapa besar uang kas yang tersedia untuk membayar utang. Dapat dikatakan bahwa rasio ini menunjukkan kemampuan sesungguhnya bagi perusahaan untuk membayar utang-utang jangka pendeknya. *Cash ratio* diukur dengan rumus:

$$\text{Cash Ratio} = \frac{\text{Cash or Cash Equivalent}}{\text{Current Liabilities}}$$

d. Rasio Perputaran Kas

Rasio ini digunakan untuk mengukur tingkat ketersediaan kas untuk membayar tagihan (utang) dan biaya-biaya yang berkaitan dengan penjualan. Rasio perputaran kas diukur dengan rumus:

$$\text{Rasio Perputaran Kas} = \frac{\text{Penjualan Bersih}}{\text{Modal Kerja Bersih}}$$

e. *Inventory to Net Working Capital*

Rasio ini digunakan untuk mengukur atau membandingkan antara jumlah sediaan yang ada dengan modal kerja perusahaan.

Inventory to Net Working Capital diukur dengan rumus:

$$\text{Inventory to NWC} = \frac{\text{Inventory}}{\text{Current Assets} - \text{Current Liabilities}}$$

2. Rasio Solvabilitas

Rasio solvabilitas digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk membayar seluruh kewajibannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang apabila perusahaan dibubarkan (dilikuidasi) (Kasmir, 2016). Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio solvabilitas antara lain:

a. Rasio Hutang Terhadap Aset (*Debt to Assets Ratio*)

Rasio ini digunakan untuk mengukur perbandingan antara total utang dengan total aset. *Debt to assets ratio* diukur dengan rumus:

$$\text{Debt to Assets Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Assets}}$$

b. Rasio Hutang Terhadap Ekuitas (*Debt to Equity Ratio*)

Rasio ini merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. *Debt to equity ratio* diukur dengan rumus:

$$\text{Debt to Equity Ratio} = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

3. Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan dalam menggunakan aktiva yang dimilikinya (Kasmir, 2016). Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio aktivitas antara lain:

a. Rasio Perputaran Sediaan (*Inventory Turn Over*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanam dalam sediaan (*inventory*) ini berputar dalam suatu periode.

Inventory turn over diukur dengan rumus:

$$\text{Inventory Turn Over} = \frac{\text{Cost of Goods Sold}}{\text{Inventory}}$$

b. Rasio Perputaran Aktiva Tetap (*Fixed Assets Turn Over*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur berapa kali dana yang ditanamkan dalam aktiva tetap berputar dalam satu periode. *Fixed assets turn over* diukur dengan rumus:

$$\text{Fixed Assets Turn Over} = \frac{\text{Sales}}{\text{Total Fixed Assets}}$$

c. Rasio Perputaran Aktiva (*Total Assets Turn Over*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur perputaran semua aktiva yang dimiliki perusahaan dan mengukur berapa jumlah penjualan yang diperoleh dari tiap rupiah aktiva. *Total assets turn over* diukur dengan rumus:

$$\text{Total Assets Turn Over} = \frac{\text{Sales}}{\text{Total Assets}}$$

4. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk menilai kemampuan perusahaan dalam mencari keuntungan. Rasio ini juga memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen suatu perusahaan (Kasmir, 2016). Adapun jenis-jenis rasio yang ada dalam rasio profitabilitas yang sering digunakan antara lain:

a. Margin laba atas Penjualan (*Profit Margin on Sales*)

Rasio yang digunakan untuk mengukur margin laba atas penjualan. Terdapat dua rumus untuk mengukur *profit margin*, yaitu sebagai berikut:

- Margin Laba Kotor

$$\text{Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan Bersih} - \text{HPP}}{\text{Sales}}$$

- Margin Laba Bersih

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Sales}}$$

b. *Return On Investment*

Rasio yang menunjukkan hasil (*return*) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan. *Return on investement* diukur dengan rumus:

$$\text{Return on Investment} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Assets}}$$

c. *Return On Equity*

Rasio yang digunakan untuk mengukur laba bersih sesudah pajak dengan modal sendiri. *Return on equity* diukur dengan rumus:

$$\text{Return on Equity} = \frac{\text{Earning After Interest and Tax}}{\text{Total Equity}}$$

d. Laba Per Lembar Saham Biasa (*Earning per Share of Common Stock*)

Rasio per lembar saham biasa merupakan rasio untuk mengukur keberhasilan manajemen dalam mencapai keuntungan bagi pemegang saham. Laba per lembar saham biasa diukur dengan rumus:

$$\text{Laba per lembar saham} = \frac{\text{Laba saham biasa}}{\text{Saham biasa yang beredar}}$$

2.4 Ukuran Perusahaan

Menurut Riyanto (2013), ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva. Semakin besar perusahaan diindikasikan akan mengungkapkan informasi yang lebih luas seperti mengungkapkan *sustainability report*, karena perusahaan memiliki sumber daya yang besar, aktiva yang banyak, penjualan yang besar, dan produk yang berkualitas serta mudah diawasi oleh publik dan regulator sehingga dituntut melakukan pengungkapan

yang luas kepada para *stakeholdernya* (Rahman, 2017). Penelitian ukuran perusahaan dapat menggunakan tolak ukur total aset yang disederhanakan dengan mentransformasikan ke dalam logaritma natural, sehingga ukuran perusahaan dapat diukur dengan rumus logaritma natural (total aset).

2.5 *Corporate Governance*

Forum for Corporate Governance in Indonesia (FCGI) (2001) menyatakan bahwa *corporate governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, dan karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan. Tujuan *corporate governance* adalah untuk menciptakan pertambahan nilai bagi semua pihak pemegang kepentingan.

Perkembangan ekonomi saat ini menuntut peningkatan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik antara lain melalui keterbukaan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan adanya peningkatan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*) yang dilakukan oleh direksi dan dewan komisaris, diharapkan akan membawa dampak positif pada keberlangsungan perusahaan. Menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang direksi dan dewan komisaris emiten atau perusahaan publik, terdapat peraturan yang digunakan sebagai dasar acuan bagi organ-organ perusahaan yang

terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), direksi, dewan komisaris dan komisaris independen dalam melaksanakan *good corporate governance* secara efektif. RUPS adalah organ emiten atau perusahaan publik yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada direksi atau dewan komisaris sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang perseroan terbatas dan/atau anggaran dasar. Direksi adalah organ emiten atau perusahaan publik yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan emiten atau perusahaan publik untuk kepentingan emiten atau perusahaan publik, sesuai dengan maksud dan tujuan emiten atau perusahaan publik serta mewakili emiten atau perusahaan publik, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Dewan Komisaris adalah organ emiten atau perusahaan publik yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi nasihat kepada direksi. Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang berasal dari luar emiten atau perusahaan publik dan memenuhi persyaratan sebagai komisaris independen. Tugas dari komisaris independen adalah melakukan pengawasan dan memberi nasihat kepada direksi serta memastikan perusahaan melaksanakan *corporate governance* yang baik. Sehingga dengan adanya dewan komisaris independen, tidak hanya dapat melindungi kepentingan pihak mayoritas tetapi juga pihak minoritas yang juga memiliki kepentingan terhadap perusahaan, yang mana salah satu bentuk perlindungan kepentingan tersebut adalah melakukan pelaporan pertanggungjawaban sosial (Mega, 2013 dalam Adila, 2016). Komisaris independen tidak diperbolehkan memiliki hubungan afiliasi dengan perusahaan atau independen. Hal ini bertujuan

agar tidak terjadi kecurangan dalam pengawasan terhadap kinerja perusahaan demi kelangsungan perusahaan. Perusahaan yang tercatat di BEI wajib memiliki komisaris independen dengan ketentuan jumlah komisaris independen wajib paling kurang 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

2.6 Pengungkapan

2.6.1 Pengertian Pengungkapan

Pengungkapan adalah konsep, metode dan media tentang bagaimana informasi akuntansi disampaikan kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan (Suwardjono, 2008). Pengungkapan dalam pelaporan keuangan mempunyai arti penting dalam pengambilan keputusan investasi. Pengungkapan (*disclosure*) sangat diperlukan oleh investor, karena dengan adanya pengungkapan tersebut risiko informasi yang dihadapinya menjadi berkurang. Berkurangnya risiko informasi ini dapat meningkatkan rasa aman bagi investor untuk melakukan investasi pada sekuritas perusahaan publik tertentu (Subroto, 2003 dalam Wulandari dan Atmini, 2012). Pengungkapan (*disclosure*) yang dilakukan oleh perusahaan merupakan upaya keterbukaan emiten terhadap publik mengenai kondisi perusahaan.

Informasi yang diungkapkan dalam laporan tahunan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu pengungkapan wajib (*mandatory disclosure*) dan pengungkapan sukarela (*voluntary disclosure*). Pengungkapan wajib merupakan pengungkapan informasi yang diharuskan oleh peraturan yang berlaku yaitu peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, sedangkan pengungkapan sukarela

adalah pengungkapan yang melebihi dari yang diwajibkan (Gunawan, 2000 dalam Wulandari dan Atmini, 2012).

Dalam penelitian ini, praktik pengungkapan berfokus pada pengungkapan sukarela, yaitu pengungkapan *sustainability report*. Pengungkapan ini dilakukan perusahaan di luar yang diwajibkan standar akuntansi maupun peraturan yang berlaku di Indonesia.

2.6.2 Pengungkapan Sustainability Report

Pengungkapan sosial perusahaan bersifat sukarela (*voluntary disclosure*), yaitu diungkapkan oleh perusahaan secara sukarela tanpa diharuskan oleh standar yang ada. *Sustainability report* termasuk dalam pengungkapan sosial perusahaan yang bersifat sukarela. Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), *sustainability report* merupakan bentuk laporan yang dilakukan oleh suatu perusahaan dalam rangka untuk mengungkapkan (*disclose*) atau mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan mengenai kinerja Lingkungan, Sosial dan Tata kelola yang baik (LST) secara akuntabel. Perusahaan yang mempublikasikan laporan keberlanjutan (*sustainability report*) berarti memberikan informasi yang berkaitan tentang hubungan perusahaan dengan karyawan, masyarakat, dan lingkungan.

Peraturan BAPEPAM LK Nomor Kep-431/BL/2012 tentang penyampaian laporan tahunan emiten atau perusahaan publik menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik dapat mengungkapkan informasi terkait aspek lingkungan hidup, ketenagakerjaan, pengembangan sosial dan kemasyarakatan, dan tanggung jawab produk pada laporan tahunan atau laporan tersendiri seperti laporan keberlanjutan

(*sustainability report*) atau laporan tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility report*).

Penerbitan laporan keberlanjutan di Indonesia sebagian besar didasarkan pada standar pengungkapan dalam Indeks Pelaporan Global (Otoritas Jasa Keuangan, 2017). Menurut pedoman GRI G4 *Guidelines* terdapat dua standar pengungkapan *sustainability report*, yaitu standar umum dan standar khusus. Pengungkapan standar umum dibagi menjadi tujuh aspek, yaitu:

1. Strategi dan Analisis

Pengungkapan standar berikut ini memberikan gambaran strategis umum tentang keberlanjutan organisasi, untuk memberikan konteks pada bagian laporan selanjutnya yang lebih detail dibandingkan bagian-bagian dalam pedoman. Strategi dan analisis dapat diambil dari informasi yang ada pada bagian lain dalam laporan, namun sebenarnya dimaksudkan untuk memberikan wawasan tentang topik strategis bukan sekadar ringkasan konten laporan.

2. Profil Organisasi

Pengungkapan standar ini merupakan gambaran keseluruhan mengenai karakteristik organisasi, untuk memberikan konteks bagi rincian-rincian dalam laporan dibandingkan dengan bagian-bagian yang ada dalam pedoman.

3. Aspek Material dan *Boundary* Teridentifikasi

Pengungkapan standar ini memberikan gambaran keseluruhan tentang proses yang telah diikuti oleh organisasi untuk menentukan konten laporan, aspek material dan *boundary* teridentifikasi, serta pernyataan ulang.

4. Hubungan dengan Pemangku Kepentingan

Pengungkapan standar tersebut merupakan gambaran keseluruhan tentang hubungan dengan pemangku kepentingan organisasi selama periode pelaporan. Pengungkapan standar ini tidak hanya terbatas pada keterlibatan yang dilakukan untuk tujuan penyusunan laporan.

5. Profil Laporan

Pengungkapan standar ini menyajikan gambaran keseluruhan tentang informasi dasar mengenai laporan, indeks konten GRI, dan pendekatan untuk memperoleh *assurance* eksternal.

6. Tata Kelola

Pengungkapan standar ini memberikan gambaran keseluruhan tentang:

- a. Struktur tata kelola dan komposisinya
- b. Peran badan tata kelola tertinggi dalam menetapkan tujuan, nilai, dan strategi organisasi
- c. Kompetensi dan evaluasi kinerja badan tata kelola tertinggi
- d. Peran badan tata kelola tertinggi dalam manajemen risiko
- e. Peran badan tata kelola tertinggi dalam pelaporan keberlanjutan

- f. Peran badan tata kelola tertinggi dalam mengevaluasi kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial
- g. Remunerasi dan insentif

7. Etika dan Integritas

Pengungkapan standar ini merupakan gambaran keseluruhan tentang:

- a. Nilai, prinsip, standar, dan norma di organisasi
- b. Mekanisme internal dan eksternal untuk memperoleh masukan mengenai perilaku etis dan taat hukum
- c. Mekanisme internal dan eksternal untuk melaporkan permasalahan tentang perilaku yang tidak etis atau melanggar hukum dan masalah integritas

Sementara untuk pengungkapan standar khusus dibagi ke dalam dua bagian, yaitu:

a. Pengungkapan Pendekatan Manajemen

Pendekatan manajemen dimaksudkan untuk memberikan kesempatan bagi organisasi untuk menerangkan bagaimana pengelolaan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang berkaitan dengan aspek material.

b. Indikator

Indikator memberikan informasi tentang kinerja atau dampak di bidang ekonomi, lingkungan, dan sosial dari suatu organisasi terkait

dengan aspek materialnya. Indikator dibagi menjadi tiga kategori, yaitu:

- Kategori Ekonomi

Dimensi keberlanjutan ekonomi berkaitan dengan dampak organisasi terhadap keadaan ekonomi bagi pemangku kepentingannya, dan terhadap sistem ekonomi di tingkat lokal, nasional, dan global. Kategori ekonomi menggambarkan arus modal di antara pemangku kepentingan yang berbeda, dan dampak ekonomi utama dari organisasi di seluruh lapisan masyarakat. Ada 9 item dalam kategori ini.

- Kategori Lingkungan

Dimensi keberlanjutan lingkungan berkaitan dengan dampak organisasi pada sistem alam yang hidup dan tidak hidup, termasuk tanah, udara, air, dan ekosistem. Kategori lingkungan meliputi dampak yang terkait dengan input (seperti energi, dan air) dan output (seperti emisi, efluen, dan limbah). Termasuk juga keanekaragaman hayati, transportasi, dan dampak yang berkaitan dengan produk dan jasa, serta kepatuhan dan biaya lingkungan. Ada 34 item dalam kategori ini.

- Kategori Sosial

Dimensi keberlanjutan sosial membahas dampak yang dimiliki organisasi terhadap sistem sosial di mana organisasi beroperasi. Ada 48 item dalam kategori ini. Kategori Sosial berisi sub-kategori:

- Praktik Ketenagakerjaan dan Kenyamanan Bekerja
- Hak Asasi Manusia
- Masyarakat
- Tanggung Jawab atas Produk

Menurut GRI G4 *Guidelines*, setiap organisasi yang melakukan *sustainability reporting* wajib memperhatikan prinsip-prinsip pelaporan. Prinsip pelaporan berperan penting untuk mencapai transparansi pelaporan keberlanjutan dan harus diterapkan oleh semua organisasi ketika menyusun laporan keberlanjutan. Prinsip-prinsip tersebut dibagi menjadi dua kelompok:

1. Prinsip-prinsip untuk Menentukan Konten Laporan

- a. Pelibatan Pemangku Kepentingan

Organisasi harus mengidentifikasi para pemangku kepentingannya, dan menjelaskan bagaimana organisasi telah menanggapi harapan dan kepentingan wajar dari mereka.

b. Konteks Keberlanjutan

Laporan harus menyajikan kinerja organisasi dalam konteks keberlanjutan yang lebih luas.

c. Materialitas

Laporan harus mencakup aspek yang mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan dari organisasi; atau secara substansial memengaruhi asesmen dan keputusan pemangku kepentingan.

d. Kelengkapan

Laporan harus berisi cakupan aspek material dan *boundary*, cukup untuk mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, serta untuk memungkinkan pemangku kepentingan dapat menilai kinerja organisasi dalam periode pelaporan.

2. Prinsip-prinsip untuk Menentukan Kualitas Laporan

a. Keseimbangan

Laporan harus mencerminkan aspek-aspek positif dan negatif dari kinerja organisasi untuk memungkinkan dilakukannya asesmen yang beralasan atas kinerja organisasi secara keseluruhan.

b. Komparabilitas

Organisasi harus memilih, mengumpulkan, dan melaporkan informasi secara konsisten. Informasi yang dilaporkan harus

disajikan dengan cara yang memungkinkan para pemangku kepentingan menganalisis perubahan kinerja organisasi dari waktu ke waktu, dan yang dapat mendukung analisis relatif terhadap organisasi lain.

c. Akurasi

Informasi yang dilaporkan harus cukup akurat dan terperinci bagi para pemangku kepentingan untuk dapat menilai kinerja organisasi.

d. Ketepatan waktu

Organisasi harus membuat laporan dengan jadwal yang teratur sehingga informasi tersedia tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang tepat.

e. Kejelasan

Organisasi harus membuat informasi tersedia dengan cara yang dapat dimengerti dan dapat diakses oleh pemangku kepentingan yang menggunakan laporan.

f. Keandalan

Organisasi harus mengumpulkan, mencatat, menyusun, menganalisis, dan mengungkapkan informasi serta proses yang digunakan untuk menyiapkan laporan agar dapat diuji, dan hal itu akan menentukan kualitas serta materialitas informasi.

2.6.3 Pengukuran Pengungkapan *Sustainability Report*

Pengukuran pengungkapan laporan keberlanjutan dapat dilihat dari 91 item dalam GRI G4. Menurut GRI G4, ada 91 pengungkapan item yang terkait dengan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan:

- a. 9 item untuk aspek ekonomi
- b. 34 item untuk aspek lingkungan
- c. 16 item untuk praktik ketenagakerjaan dan aspek pekerjaan yang layak
- d. 12 item untuk aspek hak asasi manusia
- e. 11 item untuk aspek masyarakat
- f. 9 item untuk aspek tanggung jawab produk

Metode analisis adalah metode yang digunakan untuk mengukur keberlanjutan pengungkapan laporan. Ini adalah salah satu metode yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data kualitatif. Karena data dari laporan keberlanjutan bersifat kualitatif, itu harus dikonversi menjadi data kuantitatif. Dalam hal ini, laporan keberlanjutan digunakan variabel dummy. Variabel dummy adalah variabel yang memiliki dua atau lebih yang berbeda level, yang merupakan kode 0 atau 1 (Sekaran & Bougie, 2016). Kode 1 diberikan untuk setiap item diungkapkan dan kode 0 diberikan untuk setiap item yang tidak diungkapkan. Selanjutnya, kode setiap item dijumlahkan untuk mendapatkan skor keseluruhan untuk setiap perusahaan. Kemudian, skor total dibagi dengan 91 indikator.

2.7 *Global Reporting Initiatives (GRI)*

Global Reporting Initiative (GRI) merupakan salah satu organisasi internasional yang didirikan pada tahun 1997 dan berpusat di Amsterdam, Belanda. Aktivitas utama dari GRI difokuskan kepada pencapaian transparansi dan pelaporan suatu perusahaan melalui pengembangan standar dan pedoman pengungkapan *sustainability report*. GRI merupakan standar yang digunakan dalam pengungkapan *sustainability report*. Standar GRI dipilih karena lebih memfokuskan pada standar pengungkapan berbagai kinerja ekonomi, lingkungan, dan sosial perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas dan pemanfaatan *sustainability reporting*. Menurut GRI, laporan keberlanjutan merupakan laporan yang memberikan pengungkapan tentang dampak terpenting dari suatu organisasi, baik positif maupun negatif terhadap lingkungan, masyarakat, dan ekonomi.

Panduan laporan keberlanjutan (*sustainability reporting guidelines*) berawal dari tahun 1997. Saat itu GRI baru dibentuk di Boston, Amerika Serikat, oleh *United Nations Environment Programme (UNEP)*, *Coalition for Environmentally Responsible Economies (CERES)*, dan *Tellus Institute*. Setelah dibentuk, GRI melahirkan panduan laporan keberlanjutan untuk pertama kalinya pada tahun 2000. Generasi berikutnya dari kerangka pelaporan keberlanjutan, G2, adalah diluncurkan pada 2002 di KTT Dunia tentang Pembangunan Berkelanjutan di Jakarta Johannesburg. Itu diresmikan sebagai Organisasi Lingkungan Program PBB (UNEP) bekerja sama organisasi di hadapan Sekretaris Jenderal PBB pada waktu itu, Kofi Annan dan secara permanen pindah ke Amsterdam, Belanda. Kemudian GRI G3,

GRI G3.1 diluncurkan berurutan pada tahun 2006 dan 2011. GRI pada 22 Mei 2013 meluncurkan standar GRI generasi keempat atau GRI G4. Pada 2017, GRI menerbitkan versi terbaru, itu GRI Standard. Di Indonesia, Standar GRI akan efektif untuk laporan yang diungkapkan setelah 1 Juli 2018. Dalam penelitian ini, laporan keberlanjutan yang diungkapkan dalam 2013-2017 menggunakan GRI G4 karena sesuai dengan tahun penelitian.

2.8 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Peneliti	Variabel	Hasil Penelitian
Annisa Annur Fitri dan Willy Sri Yuliandari (2018)	Variabel independen: kinerja keuangan Variabel dependen: pengungkapan <i>sustainability report</i>	ROA, CR, dan DPR memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> DAR dan TAT tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>
Aulia Rayendra Rahman (2017)	Variabel independen: kinerja keuangan, karakteristik perusahaan Variabel dependen: pengungkapan <i>sustainability report</i>	Profitabilitas dan umur perusahaan memiliki pengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i> Likuiditas dan ukuran perusahaan tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i>
Rimah Afsari, I Gusti Ayu	Variabel independen: <i>leverage</i> , ukuran	<i>Leverage</i> memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap luas

<p>Purnamawati, dan Made Aristia Prayudi (2017)</p>	<p>perusahaan, komite audit, kepemilikan institusional</p> <p>Variabel dependen: luas pengungkapan <i>sustainability report</i></p>	<p>pengungkapan <i>sustainability report</i></p> <p>Ukuran perusahaan, komite audit dan kepemilikan institusional memiliki pengaruh positif signifikan terhadap luas pengungkapan <i>sustainability report</i></p>
<p>Candri Puspita Marwati dan Yulianti (2015)</p>	<p>Variabel independen: ROA, CR, <i>size</i>, EPS</p> <p>Variabel dependen: <i>sustainability report</i></p>	<p>ROA memiliki pengaruh positif signifikan terhadap <i>sustainability report</i></p> <p>CR tidak memiliki pengaruh terhadap <i>sustainability report</i></p> <p><i>Size</i> dan EPS memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap <i>sustainability report</i></p>
<p>Samiadji Huda Setyawan, Willy Sri Yuliandari, dan Wiwin Aminah (2018)</p>	<p>Variabel independen: kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, dewan komisaris independen</p> <p>Variabel dependen: pengungkapan <i>sustainability report</i></p>	<p>Kepemilikan manajerial dan dewan komisaris independen memiliki pengaruh negatif terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i></p> <p>Kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i></p>
<p>Dwita Aliniar dan Sri Wahyuni (2017)</p>	<p>Variabel independen: ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, ukuran komite audit, kepemilikan saham institusional,</p>	<p>Ukuran dewan komisaris, ukuran komite audit, kepemilikan saham terkonsentrasi, ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i></p>

	<p>kepemilikan saham terkonsentrasi, ukuran perusahaan</p> <p>Variabel dependen: kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i></p>	<p>Proporsi komisaris independen dan kepemilikan saham institusional berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas pengungkapan <i>sustainability report</i></p>
Fitri Aulia Arif dan Andi Wawo (2016)	<p>Variabel independen: ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, dan likuiditas</p> <p>Variabel dependen: pengungkapan CSR</p>	<p>Ukuran perusahaan, <i>leverage</i>, dan likuiditas berpengaruh positif signifikan terhadap pengungkapan CSR</p>
Handre Diono dan Tri Jatmiko Wahyu Prabowo (2017)	<p>Variabel independen: ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, komposisi dewan komisaris wanita, profitabilitas, dan ukuran perusahaan</p> <p>Variabel dependen: pengungkapan <i>sustainability report</i></p>	<p>Ukuran dewan komisaris, komposisi dewan komisaris independen, komposisi dewan komisaris wanita, dan profitabilitas berpengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan <i>sustainability report</i></p> <p>Ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat pengungkapan <i>sustainability report</i></p>
Fitri Nur Riyani (2017)	<p>Variabel independen: kinerja keuangan</p> <p>Variabel dependen: <i>sustainability report</i></p>	<p>Profitabilitas dan likuiditas memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i></p> <p><i>Leverage</i> tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pengungkapan <i>sustainability report</i></p>

2.9 Pengembangan Hipotesis

2.9.1 Pengaruh Likuiditas Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk menunjukkan kemampuan perusahaan dalam membayar utang-utang jangka pendeknya yang jatuh tempo atau rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membiayai dan memenuhi kewajiban pada saat ditagih (Kasmir, 2016). Tingkat likuiditas yang tinggi akan menunjukkan kuatnya kondisi keuangan perusahaan. Menurut teori *stakeholder*, ketika perusahaan memiliki kinerja keuangan yang baik (*liquidity*), perusahaan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif yang mempedulikan masyarakat sekitar. Selain itu, perusahaan semacam ini cenderung untuk melakukan pengungkapan informasi yang lebih luas kepada pihak luar karena ingin menunjukkan bahwa perusahaan itu kredibel (Almilia, 2007 dalam Mulyaningsih, 2015). Salah satu upaya melakukan pengungkapan informasi yang dapat dilakukan oleh perusahaan adalah melalui pembuatan *sustainability report* sebagai upaya mendapatkan perhatian dan dukungan dari para *stakeholdernya*.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Fitri dan Yuliandari (2018) menemukan hasil bahwa likuiditas memiliki pengaruh positif antara likuiditas dengan *sustainability report*. Riyani (2017) juga menemukan pengaruh yang signifikan antara likuiditas terhadap pengungkapan *sustainability report*. Penelitian lain dilakukan oleh Arif dan Wawo (2016) menemukan hasil positif signifikan. Sehingga semakin tinggi likuiditas perusahaan maka akan semakin tinggi juga tingkat pengungkapan

sustainability report. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti memiliki hipotesis bahwa:

Ha₁: Likuiditas berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report*

2.9.2 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Ukuran perusahaan adalah besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva. Semakin besar perusahaan diindikasikan akan mengungkapkan informasi yang lebih luas seperti mengungkapkan *sustainability report*, karena perusahaan memiliki sumber daya yang besar, aktiva yang banyak, penjualan yang besar, dan produk yang berkualitas serta mudah diawasi oleh publik dan regulator sehingga dituntut melakukan pengungkapan yang luas kepada para *stakeholdernya* (Rahman, 2017). Perusahaan yang memiliki sumber daya yang besar mampu menyediakan semua informasi tentang aktivitas perusahaan. Hal tersebut berkaitan dengan teori *stakeholder* dimana perusahaan yang besar memiliki dampak yang lebih besar terhadap masyarakat dan mendapat perhatian lebih dari *stakeholder*.

Menurut *World Business Council for Sustainable Development* (WBCSD) (Suryono dan Prastiwi, 2011), *sustainability report* memberikan manfaat untuk memberikan informasi kepada *stakeholder* dan meningkatkan prospek perusahaan serta membantu mewujudkan transparansi, membangun reputasi, menjadi cerminan

perusahaan mengelola risikonya, sebagai stimulasi *leadership thinking* dan *performance* yang didukung semangat kompetisi, mengembangkan, dan memfasilitasi pengimplementasian dari sistem manajemen yang lebih baik dalam mengelola dampak lingkungan, ekonomi, dan sosial, cenderung mencerminkan secara langsung kemampuan dan kesiapan perusahaan untuk memenuhi keinginan pemegang saham untuk jangka panjang dan membangun ketertarikan para pemegang saham sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Afsari, Purnamawati, dan Prayudi (2017) menemukan hasil yang positif antara ukuran perusahaan dengan luas pengungkapan *sustainability report*. Penelitian lain yang dilakukan oleh Murti (2014) dan Aulia dan Syam (2013) juga menemukan hasil positif antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti memiliki hipotesis bahwa:

H_{α2}*: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan *sustainability report

2.9.3 Pengaruh Proporsi Dewan Komisaris Independen Terhadap Pengungkapan *Sustainability Report*

Menurut Komite Nasional Kebijakan *Governance* (KNKG) (2006), komisaris independen adalah komisaris yang tidak memiliki hubungan bisnis dan kekeluargaan dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain, serta dengan perusahaan itu sendiri. Teori *stakeholder* menyatakan perusahaan bukanlah

entitas yang beroperasi untuk kepentingannya sendiri, tetapi harus memberikan manfaat bagi semua pemangku kepentingan. Ini berarti bahwa dewan komisaris independen harus memastikan bahwa kebijakan yang dibuat harus bermanfaat bagi semua pihak (Wasito, Herwiyanti, dan Kusumastati, 2016). Karena dewan komisaris independen bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan perusahaan melaksanakan *corporate governance* yang baik.

Diono dan Prabowo (2017) dan Aliniar dan Wahyuni (2017) menemukan bahwa dewan komisaris independen terbukti memiliki pengaruh positif signifikan terhadap tingkat pengungkapan *sustainability report*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak anggota dewan komisaris independen maka semakin meningkatnya pengungkapan *sustainability report*. Berdasarkan penelitian terdahulu, peneliti memiliki hipotesis bahwa:

H_{α3}: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap pengungkapan sustainability report